

ABSTRAK / ABSTRACT

Pemanfaatan SAPK dan SIMPEG di Pemerintah Kab. Ende, hampir selalu bermasalah dengan perbedaan data keduanya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penyebabnya melalui triangulasi data kepegawaian, termasuk aspek regulasi dan pola pemanfaatannya. Data kepegawaian diperoleh dari BKPSDM Kab. Ende bersamaan kegiatan wawancara dengan pejabat terkait. Sedangkan pola pemanfaatan diperoleh melalui observasi penggunaan kedua aplikasi tersebut, termasuk dari regulasi terkait melalui studi pustaka. Data kepegawaian dianalisis dengan membandingkan elemen data (field) yang sama dari keduanya. Hasilnya menunjukkan perbedaan data pada 28 dari 66 field: 17 dari 28 field 90% valid. Sisanya <50% valid, yang didominasi data posisi dan jabatan. Secara keseluruhan 88% data valid. Sedangkan faktor penyebab yang teridentifikasi: (1) proses sinkronisasi satu arah, dari SAPK ke SIMPEG; (2) kelalaian peremajaan data; (3) keterbatasan hak akses aplikasi; (4) keterbatasan fitur aplikasi untuk mendukung tupoksi pengguna; dan (5) adanya permasalahan SAPK, yaitu: (a) kegagalan perubahan kedudukan hukum menjadi MPP bagi PNS yang diusulkan mencapai BUP; (b) pemetaan hak akses peremajaan data yang kurang tepat pada gelar dan tingkat pendidikan. Karena itu disarankan: (1) menyediakan IP statis untuk penggunaan web service sehingga sinkronisasi data menjadi dua arah; (2) memperkaya aplikasi dengan fitur yang menunjang tupoksi pengguna sehingga pengguna memperhatikan pembaharuan data secara berkala; (3) pendistribusian hak akses aplikasi kepada semua pengguna yang berkepentingan; (4) perbaikan aplikasi SAPK.

Kata kunci: SAPK, SIMPEG, SIM-SDM

The utilization of SAPK (Personnel Administration Information System) and SIMPEG (Personnel Administration and Management System) in the Ende Regency Government often encounters issues due to discrepancies in their data. This research aims to identify the causes through data triangulation of personnel, including regulatory aspects and patterns of utilization. Personnel data was obtained from the BKPSDM (Regional Personnel Agency) of Ende Regency, along with interviews conducted with relevant officials. Meanwhile, the utilization patterns were obtained through observations of the usage of both applications, including relevant regulations through literature studies. The personnel data was analyzed by comparing the same data elements (fields) from both systems. The results showed differences in data for 28 out of 66 fields: 17 out of the 28 fields were 90% valid, while the rest were less than 50% valid, predominantly concerning position and job data. Overall, 88% of the data were valid. The identified contributing factors were: (1) one-way synchronization process, from SAPK to SIMPEG; (2) negligence in data rejuvenation; (3) limited application access rights; (4) limited application features to support users' job functions; and (5) issues within SAPK, namely: (a) anomalies in changing legal positions to MPP (Civil Servant Working Unit Head) for proposed civil servants up to the rank of BUP (Head of Regency); (b) inaccurate mapping of access rights in data rejuvenation for degree and educational level. Therefore, the following recommendations are proposed: (1) providing static IP for web service usage to enable two-way data synchronization; (2) enriching the application with features that support users' job functions, prompting them to regularly update data; (3) distributing application access rights to all relevant users; and (4) improving the SAPK application.

Key words: SAPK, SIMPEG, SIM-SDM